

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara yang sedang giat melakukan pembangunan. Ini memerlukan strategi yang tepat agar pemerataan ekonomi dari hasil pembangunan yang dicapai dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam melaksanakan Pembangunan Nasional, Pemerintah memerlukan dana dalam jumlah yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat diperoleh dari Dalam Negeri dan Luar Negeri. Dana dari dalam negeri dapat diperoleh dari kegiatan ekspor, penerimaan pajak, dan penerimaan bukan pajak. Sedangkan dana dari luar negeri diperoleh dari hibah dan pinjaman luar negeri. Sementara ini juga pemerintah telah mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada untuk tetap bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi pada saat ini.

Pajak sebagai sumber pendapatan terbesar negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Indonesia. Sumber pembiayaan negara untuk APBN sebesar 80% berasal dari pendapatan pajak, oleh karena itu berbagai pembaharuan dalam bidang perpajakan yang dilakukan tersebut ditujukan untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak.

Berdasarkan UU. No 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assesment system*, yaitu wajib pajak sendiri yang menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya ke negara. Pada sistem ini wajib pajak yang aktif, sedangkan aparat perpajakan sifatnya hanya mengawasi dan membina wajib pajak.

Adanya perkembangan teknologi informasi mendorong Direktorat Jenderal Pajak menetapkan berbagai program salah satunya adalah meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan *e-system*. Untuk mendukung hal ini, Direktorat Jenderal Pajak meresmikan *e-system* perpajakan atau *elektronik intelligent service*. Pengertian *e-system* dalam perpajakan adalah suatu bentuk pelayanan yang memanfaatkan sistem komunikasi dan teknologi internet dengan aplikasinya yang meliputi *e-payment* (pembayaran pajak secara online), *e-registration* (pendaftaran wajib pajak melalui internet), *e-filling* (pelaporan pajak melalui internet) dan *e-SPT* (pengisian SPT dengan program yang disediakan DJP).

Dalam melaksanakan administrasi perpajakan, seorang wajib pajak harus melaksanakan prosedur perpajakan yang terdiri dari pengisian SPT, penyetoran pajak terutang dan pelaporan SPT dengan baik dan benar. Diantara ketiga prosedur tersebut, pengisian SPT merupakan prosedur yang paling utama dilaksanakan oleh wajib pajak, karena dengan melakukan pengisian SPT terlebih dahulu, seorang wajib pajak akan

mengetahui berapa pajak terutang yang harus dibayarnya dan kapan harus melaporkannya. SPT yang harus diisi oleh wajib pajak terdiri dari dua jenis yaitu SPT PPh dan SPT PPN. Diantara kedua jenis SPT tersebut SPT PPN memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam proses pengisian dan administrasi lainnya karena SPT PPN melibatkan banyak jumlah transaksi faktur pajak dan PPN merupakan salah satu Pajak yang memberikan kontribusi besar dalam penerimaan Negara .

Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Masa Pertambahan Nilai atau yang biasa disebut dengan SPT PPN merupakan salah satu administrasi perpajakan PPN yang harus dilaksanakan dengan cara yang benar yaitu cepat, tepat dan akurat. Setelah pengisian dilakukan dengan benar menurut wajib pajak dan sesuai dengan undang-undang perpajakan, maka SPT PPN tersebut harus dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak sesuai tempat wajib pajak terdaftar, agar KPP tersebut dapat melakukan proses perekaman data SPT PPN yang telah dilaporkan, setelah direkam pada komputer KPP, data tersebut dikirimkan kepada Direktorat Jendral Pajak secara komputerisasi. Sistem seperti ini adalah sistem administrasi perpajakan manual seperti yang terjadi pada pertengahan tahun 2007.

Saat menjalankan administrasi perpajakan PPN yang manual, bentuk pelayanan pajak yang diberikan KPP kepada para wajib pajak khususnya para PKP menjadi tidak optimal. Hal itu dikarenakan sistem administrasi manual ini akan meningkatkan *tax coplaince cost* para PKP

dalam segi waktu (*time cost*) untuk menjalankan sistem administrasi perpajakan PPN terutama pada saat pengisian SPT dan pelaporan, dikarenakan PKP harus mengalami tingkat kesulitan yang cukup tinggi ketika melakukan pengisian SPT PPN yang memiliki transaksi dengan jumlah yang banyak dan mengalami antrian yang cukup panjang dan lama untuk menunggu aparat melakukan perekaman data SPT PPN yang dilaporkan, dan para aparat akan mengalami kesulitan untuk melakukan perekaman apabila data SPT yang dilaporkan dalam jumlah yang banyak. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada penerimaan pendapatan pajak karena dalam tata cara perhitungan SPT PPN manual, Wajib Pajak bisa melakukan kesalahan dalam memasukan data transaksi dan cara perhitungan penjumlahannya.

Penulis memilih lokasi penelitian yaitu di Kantor Pelayanan Jakarta Duren Sawit. Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit sistem administrasi perpajakan secara manual tidak optimal dikarenakan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit merupakan KPP yang memiliki daftar PKP berjumlah cukup banyak, apabila para PKP melaporkan SPT PPNnya dalam bentuk e-SPT PPN maka pelaporan akan terasa lebih efektif dan efisien. Hal itu dikarenakan para PKP tidak perlu mengalami antrian yang lama dan menghabiskan waktu banyak untuk menunggu para aparat melakukan perekaman data SPT PPN, karena pelaporan dengan e-SPT PPN, aparat hanya melakukan registrasi dan perekaman SPT induk saja.

Berdasarkan fenomena diatas, dari beberapa *e-System* yang diterapkan oleh pemerintah e-SPT PPN merupakan sistem pelayanan yang sangat membantu wajib pajak dalam melaksanakan salah satu administrasi perpajakannya yaitu pengisian dan pelaporan SPT. Sebelum ada e-SPT para Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengalami tingkat kesulitan yang cukup tinggi untuk melakukan pengisian SPT PPN, terutama apabila data transaksi yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai terbilang banyak. Maka pada tahun 2007, DJP mengeluarkan UU Perpajakan baru yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menggunakan e-SPT PPN apabila transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan lebih dari 20 transaksi.

Pada umumnya wajib pajak yang menggunakan e-SPT PPN adalah wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Apabila pengisian dan pelaporan pajak pertambahan nilai oleh wajib pajak dilakukan dengan e-SPT PPN, maka para PKP tidak perlu melaporkan SPT PPN dalam lampiran SPT dengan jumlah yang banyak dan lebih *simple*, dan PKP tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengalami antrian lama dikarenakan aparat pajak tidak perlu lagi melakukan perekam data yang akan dikirimkan kepada DJP. Hal ini dikarenakan pengisian dan pelaporan SPT PPN dengan menggunakan e-SPT telah berbentuk rekaman SPT secara *digital* seperti dalam bentuk *flash disk* atau *compact disk* (CD) bisa juga dalam bentuk disket, maka para aparat cukup mengcopy data SPT PPN yang dilaporkan secara *digital* tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai e-SPT dan peranannya dalam penerimaan pendapatan pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit yang yang berjudul:

“Analisis e-SPT PPN dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.”

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan e-SPT PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit?
2. Seberapa besar peranan pelaksanaan e-SPT PPN dalam meningkatkan penerimaan pendapatan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan e-SPT PPN pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit?
- b. Untuk mengetahui seberapa besaar peranan pelaksanaan e-SPT PPN dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT oleh wajib pajak pada KPP Pratama Cibeunying?

2. Adapun manfaat dari penelitian ini :

a. Bagi Peneliti

Penulis dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai ilmu pengetahuan di bidang ilmu perpajakan dan perkembangannya, serta meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai Analisis e-SPT PPN dan kontribusinya dalam pendapatan perpajakan di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.

b. Bagi Instansi Terkait

Sebagai saran atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam penetapan kebijakan pada pelaksanaan e-SPT PPN dalam mengoptimalkan pendapatan Negara.

c. Bagi Fakultas

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Jakarta untuk mengetahui bagaimana Analisis e-SPT PPN dan kontribusinya dalam pendapatan perpajakan di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan masukan untuk memberikan gambaran dalam penelitian yang lebih mendalam mengenai peranan e-SPT PPN dan peranannya dalam meningkatkan pendapatan Negara.